

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil dan penelitian yang telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa

1. Setiap Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan oleh Kabupaten Pati, partai-partai politik mampu mengusung para kadernya dan PDIP selalu menjadi pemenang. Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Kabupaten Pati Tahun 2006 dan 2011 maupun Pemungutan Suara Ulang Tahun 2012 partai-partai politik masih menggunakan pola yang sama yaitu mampu mengusung para kadernya yang menunjukkan sikap kompetitifnya namun pada Tahun 2017 partai-partai politik membuat koalisi gemuk sehingga hanya mampu mengusung satu pasangan calon saja. Fenomena-fenomena unik pun menghiasi setiap pemilukada di Kabupaten Pati.
2. Sistem rekrutmen yang diterapkan oleh partai-partai politik yang mengusung pasangan Haryanto-Saiful Arifin adalah sistem seleksi pencalonan terbuka. Penilaian atau pertimbangan yang digunakan partai-partai politik tersebut adalah berdasarkan tingginya hasil survey dan modal-modal yang dimiliki oleh Haryanto yaitu modal politik yang berupa elektabilitas, modal social yang berupa popularitas dan tingkat kepuasan masyarakat, serta modal ekonomi.

3. Sikap pragmatis partai politik terlihat pada saat pembentukan koalisi dalam pengusung pasangan Haryanto-Saiful Arifin. Partai-partai politik tersebut tidak mempertimbangkan kesamaan ideologi. Hasil survei digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kemenangan pasangan Haryanto-Saiful Arifin yang kemudian dijadikan sebuah pertimbangan partai-partai politik tersebut dalam mengambil keputusan untuk mengusung Haryanto-Saiful Arifin.

#### **4.2. Saran**

1. Partai politik harus menjalin kerjasama yang baik dengan KPU Kabupaten Pati agar Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diselenggarakan berjalan dengan baik dan tidak menciptakan peristiwa-peristiwa yang dapat menghambat jalannya pesta rakyat tersebut.
2. Partai politik seharusnya mampu menjalankan fungsinya sebagai alat rekrutmen politik untuk dapat mengusung para kadernya yang berkompeten pada Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diselenggarakan. Partai politik harus mempersiapkan para kadernya yang berkompetensi tersebut jauh-jauh hari sebelum Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut diselenggarakan. Pemerintah seharusnya mendukung partai-partai politik tersebut dengan cara memberikan subsidi finansial yang cukup agar partai-partai politik dapat melakukan fungsi dan perannya secara baik. selain itu, hal tersebut juga mampu untuk mengurangi politik uang dalam pemilihan umum.

3. Partai politik sebagai alat rekrutmen politik dan masyarakat memberikan kepercayaan untuk menyeleksi seseorang yang mempunyai kompetensi dan kredibilitas seharusnya mampu tidak bersikap pragmatis. Pragmatisme partai politik dalam mengambil keputusan untuk mengusung seseorang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah berdasarkan faktor figur yang memiliki tingginya tingkat popularitas dan elektabilitas, jaringan yang banyak, dan modal tersebut yang akhirnya membuat proses kaderisasi partai politik terjadi kemacetan harus segera diperbaiki dengan melakukan reformasi total terhadap struktur dan segala hal yang ada di partai politik. Proses pembentukan koalisi oleh partai-partai untuk mengusung seseorang seharusnya juga tidak melakukan “pemborongan” partai sehingga membuat gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah lainnya tidak dapat mendaftarkan calon.
4. Penelitian ini memiliki keterbatasan baik dari segi teoritis, metodologis, maupun operasional teknis termasuk variasi sumber data. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam dan berkelanjutan baik dalam kerangka teoritis, metodologis maupun operasional teknis sehingga lebih mampu mengungkapkan pola-pola rekrutmen dalam partai politik dan sikap partai politik dalam melakukan proses rekrutmen calon dalam pemilihan umum.